

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT RUMAH TANGGA MISKIN DESA MONTOR KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

:

Oleh : Anjar Cahyono
Program Magister Ilmu Administrasi, Untag Surabaya

Abstract

The purpose of this study to determine Raskin Program Implementation in the village of the District Montor Banyuates Sampang, seen from the implementation process, namely How Poor Rice Program and Factors of success and failure in the implementation of Raskin. Data analysis technique used is Data Reduction Based on the results of this research is that the implementation of Raskin in the village of the District Montor Banyuates not run according to the rules It can be known First, regarding any number of rice distributed, second often incompatible with what was programmed by government, the price of which is not in accordance with the initial planning, the quality of rice ugly Fourth, fifth discrepancies raskin prices in 2015, the Sixth of a delay in the disbursement of Raskin of area is not deposited to Bulog. Factors of success and failure seen from the communication that exists is not good because it was done quickly and the lack of time for the executive to conduct socialization program, Executive manager of Raskin in the village Montor poorly for full implementation Rice Miskin, implementor at village Montor less prudent in implementing the program Raskin so that the distribution of rice Poor (Raskin) is not effective and not well targeted, and Society in the receiving Raskin mostly unaware of the institution / organization what poor rice was issued, in the implementation of Raskin Community, the main target of the program, it is expected that in every implementation kegiatannya rice for the poor program (Raskin) in the village of the District Montor there Banyuates control or supervision by local authorities to prevent irregularities in the distribution of rice.

Keyword : mplementation, Program Beras Miskin, Public Welfare, Sampang

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial utama yang sangat sulit dihadapi oleh Bangsa Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia juga sangat mempengaruhi proses pembangunan, banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang perlu dihadapi dan menjadi pusat perhatian banyak bagi orang di Indonesia. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B-2143/KMK/Dep.II/XI/2007 tertanggal 30 Nopember 2007, salah satu alternatif tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini diwujudkan dalam kebijakan perberasan untuk rumah tangga miskin (RASKIN) . pemberian bantuan beras

Miskin (Raskin) Sejak krisis moneter 1998 adalah awal mulai pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin, pada awalnya disebut Operasi Khusus kemudian pada tahun 2002 menjadi Program Raskin. Raskin, Penyaluran Beras Miskin bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk mengurangi beban bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) disamping itu juga Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses Masyarakat Miskin dalam memenuhi Kebutuhan Pangan, hal ini salah satu Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang penting dalam ketahanan Pangan, Program raskin dapat dicapai apabila melalui koordinasi antara Instansi/Lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun Daerah, Koordinasi dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian dengan mengedepankan peran penting Masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang tahun 2015 mencapai angka 24 persen dari total penduduk. Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan di Sampang, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sarana infrastuktur yang kurang memadai. Pelaksanaan Raskin di Kabupaten Sampang, Khususnya di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Setiap bulannya masyarakat yang masuk kategori masyarakat miskin akan menerima lima kilogram perbulannya dengan Harga Eceran Tertinggi Rp1.600 per kilogram, Penerima beras miskin di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur khususnya Desa Montor tahun 2015 berjumlah 418 Rumah Tangga Sasaran per KK, dimana seluruh tujuh Dusun yang ada menjadi lokasi pelaksanaan Program RASKIN di Desa Montor menjadi salah satu Desa sasaran penerima Program Raskin 2015.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan program RASKIN selama ini masih terjadi penyimpangan/penyelewengan utamanya di Desa Montor. Permasalahan utama Program Raskin yaitu kurang tepatnya sasaran dan kualitas beras serta harga beras yang tidak sesuai pada penerima manfaat, karena kesalahan persepsi masyarakat dan aparat Desa mengenai program Raskin, banyak kasus dilapangan menunjukkan bahwa Raskin tidak dibagi rata atau bergiir karena alasan sosial, kebersamaan, gotong-royong dan sebagainya. Masih terdapat masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori miskin, tetapi minta jatah raskin, sebaliknya masih ada rumah tangga miskin yang belum menerima raskin, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Dari Permasalahan di atas dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ? Apa saja faktor-faktor Keberhasilan dan Kegagalan dalam Implementasi Program Raskin di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

Tinjauan Pustaka

Konsep Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan, sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak. Menurut Budi Winarno dalam bukunya Kebijakan Publik: Teori dan Proses (2007:16) mengutip pernyataan Charles O. Jones dalam bukunya *An Introduction to the Study of Public Policy* (1984) mendefinisikan kebijakan sebagai kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Menurut Edi Suharto dalam bukunya *Analisis Kebijakan*

Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:6) mengutip pernyataan Robert Eyetone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971)

mendefinisikan kebijakan public sebagai hubungan antara unit Pemerintah dengan lingkungannya. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar scholar (pelajar) yang mempelajarinya. Padahal dalam lingkup yang nyata kebijakan publik tidak selalu menggambarkan keluasan definisi. Dalam buku yang sama Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik: sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut

Implementasi

Menurut (Wahab 1991 : 45) : Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Ia juga menyatakan, dalam implementasi khususnya yang dilibatkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandangnya yakni : "(1) pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center* atau pusat); (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*); (3) aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yakni kelompok-kelompok sasaran"(Wahab,1997 :63).

Menurut Menurut Ripley & Franklin(1986:54) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *What's happening?* (Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Jadi implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan/perilaku unit birokrasi untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan social politik dan ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak terlibat dan akhirnya terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan.

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono 2005:90) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Beras untuk Keluarga Miskin

Beras Miskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Adapun yang di maksud dengan program Raskin dalam penelitian ini adalah adalah program penanggulangan kemiskinan kluster satu, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998.

selanjutnya Pemerintah daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 tepat (tepat sasaran tepat jumlah, tepat mutu , tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi) oleh karena itu pelaksanaan program Raskin sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan dan biaya operasional dll.

- a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat adalah rumah tangga miskin di Desa atau Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil dari musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai dengan pendapatan PPLS-11BPS tahun 2011.
- b. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan. Dan perwakilan RTS-PM Raskin di setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
- c. Titik distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan atau lokasi yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan drive/subdrive/kansilog Perum BULOG.
- d. Titik bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari pelaksana distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- e. Pelaksana distribusi Raskin adalah kelompok kerja (Pokja) di TD yang ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah.
- f. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan, ketua RT/RW/RK dan beberapa orang ditunjuk oleh kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- g. Padat karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja dan meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HBD Raskin oleh Pemerintah daerah melalui APBD.
- h. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh divisi regional (Divre)/sub divisiregional (subdrive) kantor seksi logistic (kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan surat perintah (SP) Kadivre/KasubKadivre/Kakansilog.
- i. Kualitas beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
- j. SPA adalah surat Pemerintahan alokasi yang dibuat oleh Bupati/ Walikota atau ketua tim Koordinasi Raskin Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- k. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) /delivery order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- l. BAST adalah berita acara serah terima beras berdasarkan SPA dari Bupati/ Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan pelaksana distribusi.
- m. DPM-1 adalah model daftar penerima manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.
- n. DPM-2 adalah model daftar penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
- o. HPB adalah harga penjualan beras secara tunai sebesar Rp.1600/kg netto di TD
- p. PPLS-11 adalah pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS.

Pelaksana Distribusi Raskin di Desa

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkat desa/kelurahan.

- a. Kedudukan, Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.
- b. Tugas. Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.
- c. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat mempunyai fungsi
 - 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Raskin di TD. Untuk desa/kelurahan yang Titik Distribusinya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolakan Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis.
 - 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
 - 3) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
 - 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima
- d. (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Raskin Kecamatan.
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

Tujuan dan sasaran program raskin

Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin.

Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.

Tahun 2009 : Sasaran Program Raskin tahun 2009 adalah berkurangnya beban pengeluaran 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.600/Kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi).

Tahun 2010 : Sasaran Program Raskin tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 156kg/RTS/Tahun atau setara dengan 13Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp1.600/Kg netto ditempat penyerahan yang disepakati(titik

distribusi). (Sosialisasi Program Raskin 2010 oleh Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat).

Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin, yang harus tahu, memahami dan mengerti.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013:11) berpendapat bahwa "penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain". Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2004:4) "Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di tempat permasalahan yang di teliti itu terjadi, yaitu di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, karena Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena peneliti mengetahui kondisi yang terjadi di tempat penelitian, dan melihat melihat pelaksanaan program raskin tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Ada masalah mengenai pendistribusian beras miskin di desa Montor Kecamatan Banyuates kabupaten sampang
- b. Mengenai permasalahan sangat penting, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian guna untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten sampang penelitian ini.

Narasumber

Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama, narasumber bukan hanya sekedar memberikan tanggapan pada peneliti, tetapi dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyampaikan informasi yang dimiliki.

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh sebagai informan atau narasumber adalah hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan masyarakat yang

akan dimintai opininya mengenai Program Raskin serta yang akan digunakan untuk menentukan ketepatan Program Raskin pada Masyarakat Desa dilihat dari kondisi ekonomi, Narasumber adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, mereka harus memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan/Narasumber harus benar-benar tahu pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: :

1. Kepala Desa.
2. Masyarakat.

Tehnik Pengumpulan Data

Wawancara/interview

Interview sebagai proses Tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang mengumpulkan informasi yang langsung tentang beberapa data soal yang merupakan perasaan dan kecuali itu juga dapat digunakan untuk menangkap reaksi-reaksi orang dalam bentuk ekspresif sewaktu Tanya jawab sedang berjalan.

Kuisisioner

Pengumpulan data yang diperoleh dari arsip dan laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, untuk mendapatkan data penelitian maka daftar pertanyaan yang berhubungan dengan Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rumah Tangga Miskin, Masyarakat mengisi Kuisisioner dengan dipandu secara bersama dan dilakukan di lingkungan Desa Montor bersamaan dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara.

Teknik Analisis Data

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut :
Reduksi Data

Setelah melakukan wawancara dengan subjek penelitian, penelitian akan mendapatkan sejumlah data. Data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan yang disusun kemudian direduksi, di rangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicarikan temanya. Apabila data yang diperoleh dari informan banyak terdapat kesamaan maka akan diklasifikasikan dan jawabannya akan digeneralisasikan.

- a. Data yang diperoleh di klasifikasikan menurut pokok permasalahan yang dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan suatu data dengan data yang lainnya.
- b. Mengambil kesimpulan dari verifikasi
Disini peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data dan akan disajikan dalam bentuk narasi dan ditarik kesimpulan kasus. Dalam kasus ini kesimpulannya berupa penjelasan berupa narasi dari setiap informan yang diwawancarai.

Hasil Penelitian

Program Beras Raskin di Desa Montor belum dapat dikatakan berjalan dengan baik Karena banyak kendala seperti ketidaktepatan penyaluran beras terhadap masyarakat miskin serta penyaluran beras miskin tidak sesuai dengan undang-undang yang seharusnya beras miskin (Raskin) disalurkan tiap 1 bulan menjadi 4 bulan sekali

hal ini terjadi akibat dari pihak Desa belum bisa membayar dan juga kurang komunikasi antara pihak Desa dengan Kecamatan hal ini membuat penyaluran Beras Miskin terhambat.

Kaitannya dengan pengelolaan program Beras Miskin (RASKIN), maka yang dimaksud dengan implementasi di sini adalah dengan mengukur indikator pelaksanaan program Raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepatharga, tepat waktu dan tepat administrasi. Kaitannya dengan pengelolaan program Beras Miskin (RASKIN), untuk mengukur indikator pelaksanaan program Raskin terdapat 6 Indikator dan 4 Faktor-Faktor Keberhasilan dan kegagalan Program Raskin adalah Sebagai Berikut:

1. Tepat Sasaran, ketepatan penerima Raskin sesuai dengan criteria yang ditentukan. Permasalahan yang sering di dapati dalam indikator ini yaitu penyaluran Raskin tidak tepat pada sasaran. Dikarenakan tidak adanya survey langsung dan yang dilakukan hanyalah penilaian sepintas. Sehingga keluarga yang berhak menjadi tidak mendapatkan program bantuan ini
2. Tepat Jumlah, jumlah beras yang di terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15KG/KK. Dalam indikator ini permasalahan yang sering ditemui yaitu pembagian yang tidak merata. Yang seharusnya perKK berhak mendapatkan 15KG tetapi ada yang mendapatkan Lebih. Sehingga pembagian Raskin menjadi tidak merata.
3. Tepat Harga, harga yang berikan sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu 1.60/KG dan 24.00/15KG. Dalam indikator ini permasalahan yang sering ditemui yaitu harga yang diterima berbeda dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga yang seharusnya 160/KG menjadi 200-250/KG.
4. Tepat Waktu, waktu yang ditentukan untuk penerimaan Raskin ini, tepat pada saat yang ditentukan dan tidak terhambat. Pada indikator ini masalah yang sering ditemui yaitu penerimaan Raskin tidak menentu. Tengang waktu dari bulan ke bulan terasa sangat jauh. Sehingga membuat penyaluran Raskin tidak berjalan dengan baik.
5. Tepat Kualitas, mutu dari beras yang di terima atau kebersihan dari beras ini, apakah layak konsumsi atau tidak. Dalam Indikator ini permasalahan yang sering di temukan yaitu beras yang diterima berwarna kuning, kotor, dan terkadang berbau. Sehingga membuat masyarakat kecewa atas kualitas beras yang di bagikan sudah tidak baik untuk di konsumsi.
6. Tepat Administrasi, pengelolaan data penyaluran Raskin secara tepat guna dan tepat sasaran. Dalam Indikator ini masalah yang ditemui yaitu pengelolaan data penerima Raskin yang di lakukan hanya di nilai secara sepintas, tanpa melakukan survey langsung ke rumah-rumah, guna mendapatkan data yang benar dan akurat. Sehingga terjadinya masalah masalah dalam penyaluran raskin ini.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak mengetahui

- sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terdapat resistensi dari kelompok sasaran
2. Sumber Daya. Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen.
 3. Disposisi (Kecenderungan). Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan

Kesimpulan

Dari hasil analisis data, wawancara, dan kuisioner, serta fakta hasil penelitian telah mengantarkan pada kesimpulan bahwa Implementasi program Beras Miskin (Raskin) di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang diharapkan Masyarakat Desa Montor tidak sesuai, kurangnya dilakukan pengawasan serta peran Pemerintah Daerah selaku pelaksana teknis kegiatan penyaluran beras miskin (Raskin), Adapun permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut: Pertama, mengenai salah sasaran. kedua jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah, , harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, Keempat kualitas beras jelek, kelima adanya ketidaksesuaian harga raskin di Tahun 2015, Keenam adanya keterlambatan dalam penyaluran Raskin dari Daerah yang tidak disetorkan ke Bulog. Dua Faktor keberhasilan dan kegagalannya dilihat dari komunikasi yang terjalin kurang baik karena dilaksanakan secara cepat dan kurangnya waktu bagi pelaksana untuk melakukan sosialisasi program, Pelaksana pengelola Raskin di Desa Montor kurang baik untuk mendukung implementasi program Beras Miskin, implementor di Desa Montor kurang bijaksana dalam melaksanakan program Raskin sehingga pembagian Beras Miskin (Raskin) tidak efektif dan tidak tepat sasaran, dan Masyarakat dalam hal penerimaan raskin kebanyakan tidak mengetahui dari lembaga/organisasi apa beras raskin ini dikeluarkan.

Saran

Hambatan-hambatan yang perlu dibenahi untuk pelaksanaan program Raskin di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang selanjutnya. untuk itu penulis memberikan beberapa saran untuk pelaksanaan program berikutnya:

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin Masyarakat yang menjadi sasaran utama program, Diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya program beras miskin

(raskin) di Desa Montor Kecamatan Banyuates terdapat control atau pengawasan oleh pemerintah setempat agar tidak terjadi penyelewengan dalam pendistribusian beras.

2. Dalam pelaksanaan program ini perlu adanya jalur kordinasi yang jelas baik antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa juga dengan Perum BULOG sebagai penyedia stok beras Raskin, agar nantinya tidak terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih kepentingan antara Lembaga tersebut.
3. Diharapkan kepada aparat Desa Montor Dapat memperbaiki kinerja mengenai Implementasi Program Beras Miskin di wilayah kerjanya, agar permasalahan-pemmasalahan dalam program Raskin tersebut dapat segera diselesaikan Masyarakat Desa Montor dapat menerima Beras Miskin setiap bulannya.

Daftar Pustaka

- Adinugroho, L.W. *Efektiftas dan Efisiensi Distribusi Raskin Perum BULOG.. Studi Evaluasi Raskin: Kritik dan Pujian Sejak Awal*, 2010
Diluncurkan Sampai Sekarang(198-204). <http://www.bulog.go.id/>. Diakses tanggal 14 Juli 2015.
- Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG.208. Pedoman Umum Program Untuk Keluarga Miskin (RASKIN): Depdagri dan Bulog Jakarta, 2012.
- Profil Desa Dan Kelurahan Kabupaten Sampang Desa Montor, 2015
- Dun, W.N. 200.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan* oleh Samodra Wibawa dk. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.2015
- Ekowati, Lilik. 205. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program.Surakarta* :Pustaka Cakra 2013
- Gruber, Jonathan. 205. *Public Finance and Public Policy. New York: Worth Publisher.* Hastuti dk.208. Efektivitas Program Raskin.Jakarta: SMERU Research Instiute.
- Lexy J. Moleong,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Anonim, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Direktur Utama Bulog No 25 Tahun 2003, Bulog,Jakarta. 2003.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial menjadi leading sektor.
- Sugiyono, Dr, Prof, *Metode Penelitian Administrasi* , Alfabeta,Bandung : 2003.
- Suparlan, Supardi. 1995.*Kebudayaan, Kemiskinan, dalam Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropolog Perkotaan*. Yogyakarta.YOI.
- Usman, H. 2006. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Widodo Joko, 2001, *Etika birokrasi dalam pelayanan publik*, CV CITRA MALANG Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Cetakan Kedua. Yogyakarta:Media Pressindo
- Adbul,Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Dwiyanto,Agus.2006.*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik* Yogyakarta: GadjahMadaUniversity

- Rasyid, Muhammad Ryass.2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Watarsa. 2000. *Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah DKI Jakarta Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (TESS)*. Jakarta:
- Gie, The Liang. 1998. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Super Sukses dan Nurcahaya.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.